

Nama : Andri Firman Saputra

NIM : 201011402125

Kelas : 02TPLP023

Tugas : PPKn – Pertemuan 11

1. Apa pengertian dan latar belakang good governance?

Latar Belakang Good Governance

Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistik, nonpartisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.

Pengertian Good Governance

Dari segi administrasi pembangunan, good governance didefinisikan sebagai berikut: Suatu kerangka kelembagaan keseluruhan di mana warganya diizinkan untuk berinteraksi dan bertransaksi secara bebas, pada tingkat yang berbeda, untuk memenuhi aspirasi politik, ekonomi dan sosialnya. Pada dasarnya, good governance memiliki tiga aspek: (i) kemampuan warga negara untuk mengekspresikan pandangan dan mengakses pengambilan keputusan secara bebas; (ii) Kapasitas badan-badan pemerintah (baik politik maupun birokrasi) untuk menerjemahkan pandangan-pandangan ini ke dalam rencana yang realistis dan untuk mengimplementasikannya dengan biaya yang efektif; dan (iii) Kemampuan warga negara dan lembaga untuk membandingkan apa yang diminta dengan apa yang telah direncanakan, dan membandingkan apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan".

2. Bagaimana prinsip dan konsepsi good governance?

Prinsip dan Konsepsi Good Governance

Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep Good Governance sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tingkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai Agent of Change. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Good Governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan Good Corporate Governance. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216)

3. Apa saja prinsip-prinsip good governance pada sektor pemerintah?

- a. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. Tranparancy, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stake holders.
- e. Concensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- f. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

- g. Efficiency dan effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. Strategic vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki visi jauh ke depan.

4. Apa saja prinsip-prinsip good governance pada sektor swasta?

- Transparasi - Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
- Kemandirian - dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan pihak manapun
- Akuntabilitas - kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
- Pertanggungjawaban - kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap UU
- Kewajaran (fairness) - keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

5. Bagaimana cara mengembangkan struktur organisasi dan manajemen perubahan?

Struktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance Menurut Lukman Hakim Saifuddin, (2004) good governance (G) di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, good governance akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satu pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolute.

6. Bagaimana hubungan antara good governance dengan Otonomi Daerah?

Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah

Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya

penegakan hukum, transparansi dan penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah yang diindikasikan melakukan penyimpangan. Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sama lainnya, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan;
3. Personil;
4. Keuangan;
5. Perwakilan;
6. Pelayanan Publik
7. Pengawasan.